

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA
DALAM PENGUPAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI PT.PRAMITA CABANG PADANG**

TESIS

*Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh:

Handoko Gulo
1920112021

Pembimbing:

- 1. Dr. Khairani, S.H., M.H.**
- 2. Dr. M. Hasbi, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PENGUPAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT.PRAMITA CABANG PADANG

(Handoko Gulo, S.H., NPM 1920112021, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Halaman 130, Tahun 2021)

ABSTRAK

Pada masa Pandemi Covid-19 banyak kebijakan dan peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan pandemi ini yang berfokus pada kesehatan dan perekonomian, sampai pada semester kedua tahun 2021 tepatnya Tanggal 13 Agustus 2021 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.104 Tahun 2021 yang menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja demi kelangsungan usaha sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan pekerja yang mengakibatkan pemotongan upah yang sangat signifikan terjadi bila tidak masuk kerja. Hal inilah yang menjadi sangat menarik untuk diteliti dimana objek penelitiannya di PT. Pramita Cabang Padang dengan vendornya PT.Nutrindo Nusa Campita. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja di lingkungan PT.Pramita Cabang Padang dan bagaimanakah pelaksanaan pengupahan pekerja di lingkungan PT. Pramita Cabang Padang pada masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dan sifat penelitiannya adalah eksploratif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa bentuk hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja di PT. Pramita cabang Padang adalah berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan tetapi tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dikarenakan tidak memiliki serikat pekerja, sebaliknya PT. Nutrindo Nusa Campita tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis dan peraturan perusahaan sehingga bertentangan dengan pasal 57 ayat (1) jo. Pasal 66 UU Cipta kerja dan Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang sangat berdampak bagi pekerja alih daya. Pelaksanaan pengupahan pada masa Pandemi Covid-19 termasuk keadaan memaksa yang relatif sehingga para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan pengupahan bagi pekerja yang melaksanakan Work From Home (WFH) atau Work From Office (WFO) atau kombinasi keduanya serta pekerja yang dirumahkan sementara waktu tetap berhak atas Upah dan apabila ada penyesuaian upah akibat pandemi Covid-19 ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan BAB II Huruf B KepMenaker No.104 Tahun 2021 dan pengusaha dilarang memberikan upah dibawah upah minimum baik dengan kesepakatan maupun tanpa kesepakatan termuat dalam Pasal 81 Angka 25 dalam Pasal 88E ayat (2) UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci : hubungan kerja, pengupahan, hukum ketenagakerjaan, covid-19

LEGAL PROTECTION FOR WORKERS IN WAGES DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT PT. PRAMITA BRANCH PADANG

(Handoko Gulo, S.H., NPM 1920112021, Postgraduate Masters Program in Law, Faculty of Law, Andalas University, page 130, 2021)

ABSTRACT

During the Covid-19 Pandemic, many policies and laws were issued by the government in handling this pandemic that focused on health and the economy, until the second half of 2021, to be precise, on August 13, 2021, the government issued Decree of the Minister of Manpower No. 104 of 2021 which caused some or all of the all workers do not come to work for the sake of business continuity in accordance with the agreement of the entrepreneur and the worker which results in very significant wage deductions occurring if they do not come to work. This is what becomes very interesting to study where the object of research is at PT. Pramita Padang Branch with its vendor PT. Nutrido Nusa Campita. So the problems in this research are: how is the legal relationship between workers and employers in PT. Pramita Padang Branch and how is the implementation of wages for workers in PT. Pramita Padang Branch during the Covid-19 Pandemic. The research method used is sociological juridical (empirical) and the nature of the research is explorative, the data sources used are primary and secondary data. Based on the results of the study, it can be concluded that the form of legal relationship between workers and employers at PT. Pramita Padang branch is based on a Work Agreement and Company Regulations but does not have a Collective Labor Agreement because it does not have a labor union, on the other hand PT. Nutrido Nusa Campita does not have a written work agreement and company regulations so that it is contrary to article 57 paragraph (1) jo. Article 66 of the Employment Creation Law and Article 108 paragraph (1) of the Manpower Law which have a major impact on outsourced workers. The implementation of wages during the Covid-19 Pandemic includes a relatively forced situation so that it is still possible for the parties to carry out their obligations. The implementation of wages for workers who carry out Work From Home (WFH) or Work From Office (WFO) or a combination of both as well as workers who are temporarily laid off are still entitled to Wages and if there is a wage adjustment due to the Covid-19 pandemic, this must be done based on an agreement in accordance with the CHAPTER II Letter B Decree of the Minister of Manpower No.104 of 2021 and employers are prohibited from providing wages below the minimum wage either by agreement or without agreement as contained in Article 81 Number 25 in Article 88E paragraph (2) of Law No.11 of 2020 concerning Job Creation.

Keywords: employment relationship, wages, employment law, covid-19